

Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun)

AI Fath^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: 2210611213@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Diterima: 2 November 2023

Direview: 28 November 2023

Disetujui: 30 November 2023

Abstract

Money laundering is an illegal act that has a negative impact on the economy and financial stability of a country. In Indonesia, PPATK (Financial Transaction Reports and Analysis Center) has an important role in the prevention and handling of money laundering crimes. In facing the times and technology, PPATK needs to increase the use of information technology to improve the quality of its work. This article examines the role of PPATK in the case of Rafael Alun, a tax official who was involved in money laundering. PPATK plays a role in identifying and recovering assets originating from these crimes. PPATK also conducts training and outreach, analyzes financial transactions, reports suspicious transactions, and cooperates with law enforcement agencies in prevention and prevention efforts. In addition, this article discusses the importance of developing information technology in improving the quality of PPATK. Increasing sophisticated data analysis systems and using artificial intelligence (AI) technology can assist PPATK in identifying suspicious transactions quickly and accurately. However, the use of this technology must be carried out ethically and maintain user privacy. In addition, the application of biometric identification as a method of strengthening customers can strengthen the process of preventing money laundering. In conclusion, this article emphasizes the importance of using information technology in preventing money laundering by PPATK. By utilizing the right technology, PPATK can be more effective in fighting money laundering and maintaining state financial stability.

Keywords: Money Laundering; Officials; PPATK.

Abstrak

Pencucian uang merupakan tindakan ilegal yang memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan suatu negara. Di Indonesia, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang. Dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, PPATK perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Artikel ini membahas peran PPATK dalam kasus Rafael Alun, seorang pegawai pajak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. PPATK berperan dalam mengidentifikasi dan merecovery aset-aset yang berasal dari tindak pidana tersebut. PPATK juga melakukan pelatihan dan sosialisasi, analisis transaksi keuangan, pelaporan transaksi mencurigakan, serta kerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan. Selain itu, artikel ini membahas pentingnya pengembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas PPATK. Peningkatan sistem analisis data yang canggih dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat membantu PPATK dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan secara cepat dan akurat. Namun, penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan etika dan menjaga privasi pengguna. Selain itu, penerapan biometric identification sebagai metode identifikasi nasabah dapat memperkuat proses pencegahan pencucian uang. Dalam kesimpulannya, artikel ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pencegahan pencucian uang oleh PPATK. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, PPATK dapat menjadi lebih efektif dalam melawan tindak pidana pencucian uang dan menjaga stabilitas keuangan negara.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Pejabat, PPATK.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai perangkat untuk mengatur seluruh orang yang berada didalamnya sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu Indonesia merupakan negara hukum.¹ Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Umar Said Sugiarto, hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Barangsiapa melanggar norma hukum, maka dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, setiap warga negara secara otomatis terikat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat biasa namun juga semua orang seperti pejabat negara di Indonesia.

Di Indonesia ada banyak lembaga yang berperan dalam pencegahan pencucian uang di Indonesia antara lain PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain. Namun dalam penerapannya PPATK menjadi garda terdepan dalam mendeteksi pelaku pencucian uang, karena PPATK memiliki peran dalam penerimaan dan Analisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. PPATK merupakan lembaga independen yang berada di bawah koordinasi Presiden dan bertugas untuk menerima, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Hukum pencucian uang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 pencucian uang adalah kegiatan yang melibatkan pengubahan atau pemalsuan sumber dana yang didapat dari kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal lainnya menjadi sumber dana yang terlihat sah atau legal.³ Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan jejak atau asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK beroperasi secara independen dan terpisah dari instansi keuangan dan aparat penegak hukum. PPATK juga bekerja sama dengan lembaga internasional dalam hal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Egmont Group.⁴

Belum lama ini terjadi kasus kekerasan yang melibatkan anak pejabat dari menteri keuangan, pejabat tersebut menjabat sebagai DJP Jakarta selatan. Saat kasus ini viral, banyak masyarakat yang memperhatikan gaya hidup yang dimiliki oleh

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2010.

⁴ Toetik Rahayuningsih, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia," *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 314–330.

anak pejabat tersebut, mulai dari memiliki motor harley hingga mobil rubicon. Saat ditelusuri lebih jauh, rupanya harta kekayaan pegawai pajak tersebut mencapai 56 miliar rupiah. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), harta kekayaan tersebut berupa mobil sedan camry senilai 125 juta rupiah, toyota kijang senilai 300 juta rupiah, 11 bidang tanah di berbagai tempat senilai 51,9 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 420 juta rupiah, harta lainnya senilai 420 juta rupiah, dan kas senilai 1,3 miliar rupiah.⁵ Namun, dalam dalam laporan tersebut motor harley dan mobil jeep rubicon yang dipamerkan di media sosial anaknya Rafael Alun yaitu Mario tidak ada dalam laporan tersebut. Hal tersebut pun dianggap tidak sesuai dengan harta yang ada pada Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mengingat pekerjaan Rafael Alun yang hanya menjabat sebagai kepala Bagian Umum dan merupakan pejabat eselon III dengan golongan III d dengan perkiraan gaji sekitar Rp 44.978.800 hingga Rp 51.275.000.⁶

Pada tahun 2012 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael Alun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dalam laporan itu belum ditindaklanjuti oleh KPK karena pada tahun 2012 rafael alun bukan termasuk penyelenggara negara.⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah membekukan lebih 40 rekening yang dimiliki oleh Rafael Alun dan juga keluarganya terkait pencucian uang, 40 rekening tersebut yang mutasinya sekitar Rp 500 miliar dalam periode 2019 sampai 2023.⁸ Rafael Alun Trisambodo yang melakukan pencucian uang dengan menggunakan 40 rekening dapat dijerat dengan hukum pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin membahas peran PPATK dalam kasus Rafael Alun dan Pengembangan Teknologi informasi dalam peningkatan kualitas PPATK

METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, "*metode yuridis normatif merupakan suatu proses penemuan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan*

⁵ Jauhari Mahardika, "Harta Milik Rafael Alun Trisambodo," *Investor.Id*, 2023, <https://investor.id/infografis/324257/harta-rafael-alun-trisambodo#:~:text=KPK%20menyatakan%2C%20harta%20kekayaan%20eks,harta%20Rp%2056%2C1%20miliar>.

⁶ Aulia Akbar, "Segini Gaji PNS Pajak Ala Bapak Mario Dandy, Kebeli Rubicon?," *CNBC Indonesia*, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230224131655-72-416726/segini-gaji-pns-pajak-ala-bapak-mario-dandy-kebeli-rubicon#:~:text=Gaji%20pokok%20eselon%20III%20berkisar,bisa%20mencapai%20Rp%2046.478.000>.

⁷ Yogi Ernes, "Penjelasan Kpk Soal Laporan Terkait Rafael Alun Sejak 2012," *detikNews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6595113/penjelasan-kpk-soal-laporan-ppatk-terkait-rafael-alun-sejak-2012/1>.

⁸ Yohana Artha, "PPATK Blokir Lebih Dari 40 Rekening Rafael Alun Trisambodo Dan Keluarga, Nilai Mutasi Capai Rp 500 Miliar," *Kompas.Com*, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/03/07/162000526/ppatk-blokir-lebih-dari-40-rekening-rafael-alun-trisambodo-dan-keluarga-nilai>.

kejahatan. Setelah melakukan identifikasi, PPATK akan memberikan laporan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melakukan tindakan *assets recovery*. Selain itu, PPATK juga dapat melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam upaya *assets recovery*. Misalnya, PPATK dapat melakukan kerja sama dengan kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kantor Pajak untuk melakukan penyitaan atau pembekuan aset-aset yang berasal dari kejahatan. Dalam konteks kasus Rafael Alun Trisambodo, PPATK juga terlibat dalam upaya *assets recovery* dengan membantu mengidentifikasi dan merecovery aset-aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo dengan 40 rekening. Dalam melakukan upaya *assets recovery*, PPATK juga harus memperhatikan aspek hukum dan prosedur yang berlaku, serta memastikan bahwa upaya yang dilakukan tidak merugikan pihak yang tidak berkepentingan.

Dalam penerapannya, PPATK melakukan beberapa hal dalam mencegah *money laundering*, yang pertama adalah pemberian pelatihan dan sosialisasi. PPATK memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait seperti lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum mengenai cara mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan serta cara mencegah pencucian uang.¹¹ Kedua, PPATK melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dicurigai melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari analisis tersebut, PPATK dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan tindakan pencegahan atau penindakan.¹² Ketiga, PPATK memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada lembaga penegak hukum jika terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Laporan tersebut dapat membantu lembaga penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang.¹³ Keempat, PPATK melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama tersebut dapat membantu dalam mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan.¹⁴ Kelima, PPATK terus mengembangkan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas analisis transaksi keuangan dan mempercepat pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana pencucian uang secara lebih efektif dan efisien.¹⁵

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Semester 1 Tahun 2017" (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2017).

¹² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Tugas Dan Fungsi PPATK," n.d., https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779.

¹³ "Semester 1 Tahun 2017."

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "RENCANA STRATEGIS PPATK TAHUN 2020-2024" (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019).

membantu meningkatkan efektivitas investigasi dan penindakan.¹⁷ Namun, teknologi AI juga harus diimbangi dengan pengawasan dan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan etika dan tidak melanggar privasi pengguna. Teknologi AI juga harus diimbangi dengan pengawasan dan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan etika dan tidak melanggar privasi pengguna.

Dalam memperkuat proses identifikasi nasabah dan memperkecil risiko identitas palsu maka perlu adanya *Biometric identification*, *Biometric identification* merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pencucian uang.¹⁸ Teknologi ini menggunakan pengenalan pola unik pada setiap individu, seperti sidik jari, wajah, iris mata, atau suara, sebagai identifikasi pengguna. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, *biometric identification* dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dengan teknologi ini, setiap transaksi keuangan dapat dikaitkan dengan identitas pengguna yang sah dan dapat dipercaya, sehingga dapat membantu menghindari kejahatan pencucian uang yang melibatkan penggunaan identitas palsu atau informasi yang tidak benar. Selain itu, *biometric identification* juga dapat membantu dalam proses verifikasi identitas pengguna pada tahap pendaftaran akun atau pembukaan rekening bank. Dalam hal ini, teknologi ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan kepercayaan terhadap proses pendaftaran atau pembukaan rekening, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan identitas atau informasi palsu.¹⁹ Penggunaan *biometric identification* memerlukan kehati-hatian dan perlindungan privasi yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan prosedur yang jelas dan transparan dalam penggunaan teknologi ini, serta perlindungan data pribadi yang memadai untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan informasi. *Biometric identification* juga sudah dipakai lembaga dain di Indonesia seperti Direktorat Jenderal Pajak, pemakaian *biometric identification* di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia dianggap efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan verifikasi identitas wajib pajak. DJP telah menggunakan teknologi biometrik, seperti sidik jari, untuk mengidentifikasi wajib pajak dalam beberapa proses. Dengan menggunakan teknologi biometrik, DJP dapat memastikan bahwa identitas wajib pajak terverifikasi secara akurat dan efektif. Hal ini dapat membantu DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi kesalahan dalam pengisian informasi, serta mempercepat proses verifikasi identitas wajib pajak. Selain itu,

¹⁷ Miftahurrohman, "Bagaimana AI Menghentikan Pencucian Uang," n.d., <http://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/Bagaimana-AI-Menghentikan-Pencucian-Uang/4d9e0bec4d3a2bdf47a903e7bc7443ccd38ec5ab>.

¹⁸ Hari Mantik, "PENGEMBANGAN EKYC (ELECTRONIC KNOW-YOUR-CUSTOMER) MENGGUNAKAN METODE BIOMETRIC SEBAGAI ALAT BANTU VERIFIKASI DATA PELANGGAN. STUDI KASUS PT XYZ.," *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 9, no. 1 (2022): 61–70.

¹⁹ Mohammad Arifin, "SISTEM PENGAMANAN MESIN ATM DENGAN MENGGUNAKAN PENGENALAN SIDIK JARI DAN WAJAH FACE RECOGNITION UNTUK MEMINIMALISIR CYBERBANKING CRIME" (Universitas Airlangga, 2022).

teknologi biometrik juga dapat membantu DJP dalam mengurangi praktik kecurangan dan penipuan pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, PPATK perlu menggunakan *biometric identification* dalam mencegah upaya tindak pidana pencucian uang.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta analisa diatas dapat disimpulkan bahwa peran PPATK dalam kasus Rafael Alun Trisambodo sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana pencucian uang, Serta PPATK juga memiliki peran penting dalam upaya assets recovery di Indonesia. Dari pentingnya peran PPATK dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang maka peningkatan teknologi dan informasi sangat penting untuk membantu hal tersebut, mulai dari peningkatan sistem analis data, kecerdasan buatan, hingga dipakainya identifikasi biometrik.

Maka dari itu, penulis menyusun saran terkait hal peningkatan teknologi dan informasi di PPATK, yang pertama penggunaan *biometric identification* memerlukan kehati-hatian dan perlindungan privasi yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan prosedur yang jelas dan transparan dalam penggunaan teknologi ini, serta perlindungan data pribadi yang memadai untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan informasi. Kedua, teknologi AI juga harus diimbangi dengan pengawasan dan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan etika dan tidak melanggar privasi pengguna. Ketiga, peningkatan teknologi harus disertai dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. PPATK dapat memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan analisis data dan memahami teknologi yang digunakan oleh PPATK.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aulia. "Segini Gaji PNS Pajak Ala Bapak Mario Dandy, Kebeli Rubicon?" *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230224131655-72-416726/segini-gaji-pns-pajak-ala-bapak-mario-dandy-kebeli-rubicon#:~:text=Gaji%20pokok%20eselon%20III%20berkisar,bisa%20mencapai%20Rp%2046.478.000>.
- Arifin, Mohammad. "SISTEM PENGAMANAN MESIN ATM DENGAN MENGGUNAKAN PENGENALAN SIDIK JARI DAN WAJAH FACE RECOGNITION UNTUK MEMINIMALISIR CYBERBANKING CRIME." Universitas Airlangga, 2022.
- Artha, Yohana. "PPATK Blokir Lebih Dari 40 Rekening Rafael Alun Trisambodo Dan Keluarga, Nilai Mutasi Capai Rp 500 Miliar." *Kompas.Com*, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/03/07/162000526/ppatk-blokir-lebih-dari-40-rekening-rafael-alun-trisambodo-dan-keluarga-nilai>.
- Ernes, Yogi. "Penjelasan Kpk Soal Laporan Terkait Rafael Alun Sejak 2012." *detikNews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6595113/penjelasan-kpk-soal-laporan-ppatk-terkait-rafael-alun-sejak-2012/1>.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.
- — —. *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2010.
- Mahardika, Jauhari. "Harta Milik Rafael Alun Trisambodo." *Investor.Id*, 2023. <https://investor.id/infografis/324257/harta-rafael-alun-trisambodo#:~:text=KPK%20menyatakan%2C%20harta%20kekayaan%20eks,harta%20Rp%2056%2C1%20miliar>.
- Mantik, Hari. "PENGEMBANGAN EKYC (ELECTRONIC KNOW-YOUR-CUSTOMER) MENGGUNAKAN METODE BIOMETRIC SEBAGAI ALAT BANTU VERIFIKASI DATA PELANGGAN. STUDI KASUS PT XYZ." *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma* 9, no. 1 (2022): 61-70.
- Miftahurrohman. "Bagaimana AI Menghentikan Pencucian Uang," n.d. <http://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/Bagaimana-AI-Menghentikan-Pencucian-Uang/4d9e0bec4d3a2bdf47a903e7bc7443ccd38ec5ab>.
- Muhaimin, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram, 2020.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "RENCANA STRATEGIS PPAATK TAHUN 2020-2024." Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019.
- — —. "Semester 1 Tahun 2017." Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2017.
- — —. "Tugas Dan Fungsi PPAATK," n.d. https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779.

Fath, A. (2023). Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62.

Rahayuningsih, Toetik. “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia.” *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 314–330.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.